



RENJA

2025

Inspektorat Sidoarjo
Where the accountability began 



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME, berkat rahmat dan hidayah-Nya, dokumen rancangan rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah pada hakikatnya merupakan perwujudan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Tersusunnya dokumen rancangan rencana kerja Inspektorat Daerah ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan, kritik dan saran tetap kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan dokumen Renja tahun berikutnya.

Sidoarjo, 09 Juli 2024

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP 197009261990031005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	25
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat	28
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah	35
3.3. Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38
BAB V PENUTUP	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

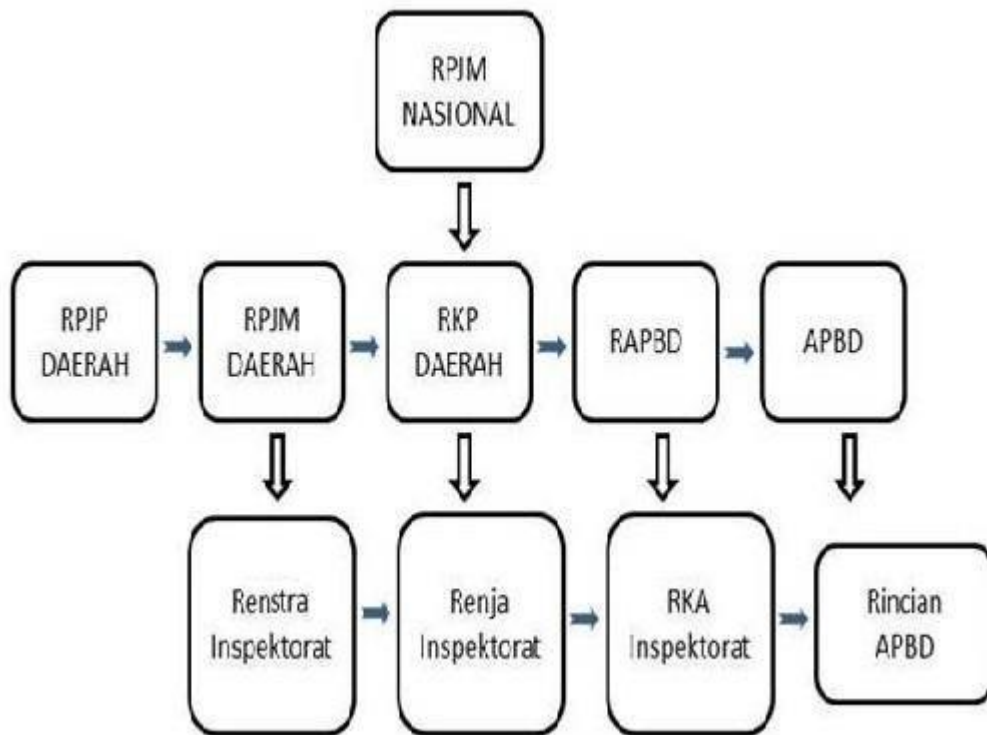
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Pada Renja Perangkat Daerah bisa menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada rancangan awal RKPD serta Reviu Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan, alternatif dan atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan RPJM Daerah dan RPJM Nasional, dimana dokumen ini dibuat sebagai acuan dalam menyusun Renja dan RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Setelah Renja dan RKA tersusun, tahap berikutnya dilakukan penyusunan rincian rencana APBD yang nantinya akan disahkan dalam APBD.



Berikut ini disajikan hubungan keterkaitan antara Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan lainnya.



Kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis PP Nomor 8 Tahun 2008. Dalam keempat peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Renja Perangkat Daerah ini memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.



1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaannya Rencana Pembangunan Daerah;
17. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
24. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja sebagai pedoman acuan perencanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

1. Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional di berbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalan dengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan;



2. Menyusun Program dan Kegiatan kedepan berdasarkan potensi serta fungsi Inspektorat Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tersedianya seluruh informasi dalam Rencana Kerja dan diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2025 ini Inspektorat Daerah akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami RENJA Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Inspektorat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Daerah, serta



susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian Tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Inspektorat Daerah. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Daerah Sidoarjo Tahun 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menyajikan Rencana Kerja berupa Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat



Daerah pada Tahun 2025 beserta Rencana Penganggarannya.

Bab V. Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) subkegiatan dengan masing-masing indikator sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator program :

- Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan.

Terdiri dari 6 (enam) kegiatan, antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan :

- Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan

- Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan

Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, antara lain:

1.1. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Indikator sub kegiatan:

- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Capaian kinerja:

- Kinerja input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 91,60% yaitu dari target dana sebesar Rp 3.301.233,00 terealisasi sebesar Rp 3.024.000,00.

- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 4 (empat) dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan:

- Persentase realisasi anggaran PD.

Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, antara lain:

2.1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 96,79% yaitu dari target dana sebesar Rp 14.351.676.922,00 terealisasi sebesar Rp 13.891.471.903,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 101,23% yaitu dari target 81 ASN yang mendapat gaji dan tunjangan terealisasi sebanyak 82 ASN yang mendapat gaji dan tunjangan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan:

- Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal

Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, antara lain:

3.1 Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 92,44% yaitu dari target dana sebesar Rp 67.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 62.400.000,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 105,71% yaitu dari target 70 orang telah terealisasi 74 orang.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan:

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Terdiri dari 7 (tujuh) subkegiatan, antara lain:

4.1 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.



Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 81,97% yaitu dari target dana sebesar Rp 23.267.167,00 terealisasi sebesar Rp 19.072.500,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 paket terealisasi sejumlah 1 paket.

4.2 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 86,32% yaitu dari target dana sebesar Rp 30.446.507,00 terealisasi sebesar Rp 26.281.300,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 paket terealisasi sejumlah 1 paket.

4.3 Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 86,13% yaitu dari target dana sebesar Rp 9.917.073,00 terealisasi sebesar Rp 8.541.400,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 paket terealisasi sejumlah 1 paket.

4.4 Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 91,98% yaitu dari target dana sebesar Rp 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 229.953.725,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 paket terealisasi sejumlah 1 paket.

4.5 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 68,56%



yaitu dari target dana sebesar Rp 18.253.000,00 terealisasi sebesar Rp 12.513.943,00.

- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 paket terealisasi sejumlah 1 paket.

4.6 Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 92,53% yaitu dari target dana sebesar Rp 272.047.500,00 terealisasi sebesar Rp 251.714.300,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 4 laporan terealisasi sebanyak 4 laporan.

4.7 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 87,53% yaitu dari target dana sebesar Rp 948.431.712,00 terealisasi sebesar Rp 830.143.074,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 4 laporan terealisasi sebanyak 4 laporan.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan:

- Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran.

Terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, antara lain:

5.1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 47,67% yaitu dari target dana sebesar Rp 600.000,00 terealisasi sebesar Rp 286.000,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 4 laporan terealisasi sebesar 4 laporan.

5.2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.



Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 94,64% yaitu dari target dana sebesar Rp 172.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 163.257.069,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 4 laporan terealisasi sebesar 4 laporan.

5.3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 98,73% yaitu dari target dana sebesar Rp 840.059.632,00 terealisasi sebesar Rp 829.413.644,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target total 4 laporan terealisasi sebesar 4 laporan.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan:

- Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi.

Terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, antara lain:

6.1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 40,23% yaitu dari target dana sebesar Rp 30.776.999,00 terealisasi sebesar Rp 12.380.921,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 unit yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya terealisasi sebesar 1 unit yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

6.2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.



Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 86,82% yaitu dari target dana sebesar Rp 96.733.263,00 terealisasi sebesar Rp 83.980.251,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 13 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya terealisasi sebesar 13 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

6.3. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 93,01% yaitu dari target dana sebesar Rp 98.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 91.617.314,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 102,85% yaitu dari target 35 buah peralatan dan mesin terealisasi sebesar 36 buah peralatan dan mesin.

6.4. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 70,52% yaitu dari target dana sebesar Rp 55.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 38.788.450,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 200% yaitu dari target 1 unit terealisasi sebesar 2 unit.

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator program:

- Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi
- Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi
- Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal A
- Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti
- Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan, antara lain:



1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Indikator kegiatan:

- Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun tepat waktu

Terdiri dari 5 (lima) subkegiatan, antara lain:

1.1. Subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 94,26% yaitu dari target dana sebesar Rp 482.240.000,00 terealisasi sebesar Rp 454.582.500,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 101,69% yaitu dari target 295 laporan yang disusun terealisasi sebesar 300 laporan yang disusun.

1.2. Subkegiatan Reviu Laporan Kinerja.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 89,99% yaitu dari target dana sebesar Rp 7.419.751,00 terealisasi sebesar Rp 6.676.750,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 2 laporan hasil reviu laporan kinerja terealisasi sebesar 2 laporan hasil reviu laporan kinerja.

1.3. Subkegiatan Reviu Laporan Keuangan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil reviu keuangan.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 10,68% yaitu dari target dana sebesar Rp 119.761.591,00 terealisasi sebesar Rp 12.787.000,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 laporan hasil reviu keuangan terealisasi sebesar 1 laporan hasil reviu keuangan.

1.4. Subkegiatan Pengawasan Desa.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil pengawasan desa.

Capaian kinerja:



- Kinerja input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 95,68% yaitu dari target dana sebesar Rp 133.462.500,00 terealisasi sebesar Rp 127.700.000,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 57 laporan hasil pengawasan desa terealisasi sebesar 84 laporan hasil pengawasan desa.

1.5. Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 89,89% yaitu dari target dana sebesar Rp 8.995.551,00 terealisasi sebesar Rp 8.086.500,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 400% yaitu dari target 4 laporan terealisasi sebesar 16 laporan.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Indikator kegiatan:

- Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun tepat waktu.

Terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, antara lain:

2.1. Subkegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 55,33% yaitu dari target dana sebesar Rp 180.750.000,00 terealisasi sebesar Rp 100.000.000,00.
- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 400% yaitu dari target 1 laporan penyelesaian kerugian negara/daerah terealisasi sebanyak 4 laporan penyelesaian kerugian negara/daerah.

2.2. Subkegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada tahun 2023, kinerja input telah tercapai sebesar 64,32% yaitu dari target dana sebesar Rp 568.277.500,00 terealisasi sebesar Rp



365.527.500,00.

- Kinerja output, pada tahun 2023, kinerja output telah tercapai sebesar 115,63% yaitu dari target 32 laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu terealisasi sebanyak 37 laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu.



HASIL CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN 2023

1. Pencapaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Terlaksananya pengawasan yang efektif berbasis risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>	<i>Integrated</i>	100%	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84,50 (A)	86,34 (A)	102,18%	
	Nilai RB	36,13	-	-	*)
	Nilai IPP	4,05 (A-)	4,07 (A-)	100,5%	
	Nilai IKM/SKM	90,00 (Sangat Baik)	95,01 (Sangat Baik)	105,1%	

*) Terjadi perubahan regulasi, merujuk pada Permen PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023.

Indikator kinerja “Tingkat Kapabilitas APIP” merupakan indikator sasaran terlaksananya pengawasan yang efektif berbasis risiko. Capaian indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi *integrated* (level 3) dari target *integrated* (level 3). Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Penilaian atas penerapan tata kelola APIP mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

1. Peran dan Layanan APIP (Services and Role of Internal Auditing)
2. Pengelolaan SDM (People Management)
3. Praktik Profesional (Professional Practices)
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability)
5. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture)
6. Struktur Tata Kelola (Governance Structures)

Berdasarkan hasil quality assurance (QA) BPKP Pusat yang telah ditetapkan dengan Surat BPKP Nomor: PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023, nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 adalah level 3 (*integrated*) dengan skor 3,000 ini



mencerminkan bahwa APIP Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan layanan compliance auditing, performance auditing dan practice advisory antara lain:

1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities);
2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan
3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).

Adapun upaya yang telah dilakukan agar nilai Kapabilitas APIP lebih optimal, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat yang berkaitan pengawasan berbasis risiko;
2. Memutakhirkan risk register yang disusun PERANGKAT DAERAH sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.

Pada indikator kinerja ini, tidak tersedia data target nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023.

Sementara itu, sasaran kedua, yakni meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah memiliki empat indikator kinerja diantaranya:

1. Nilai SAKIP

Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 102,18% dengan realisasi 86,34 (A) dari target 84,50 (A). SAKIP merupakan alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Penilaian SAKIP didasarkan pada 4 komponen yaitu :

- a. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
- b. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%
- c. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25%

Pada komponen LKE SAKIP yang meliputi, Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2023, nilai SAKIP Inspektorat Daerah adalah 86,34 dengan predikat A (memuaskan) berdasarkan hasil evaluasi oleh evaluator SAKIP kabupaten yang telah ditetapkan dengan Surat Inspektur Kabupaten Sidoarjo Nomor: 700/3519/438.4/2023 tanggal 9 Desember 2023. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah menduduki peringkat ketiga dari 49 PERANGKAT DAERAH. Ini berarti Inspektorat Daerah sudah dapat mengimplementasikan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil dikarenakan pengukuran kinerja telah



dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator dengan hasil berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Upaya yang telah dilakukan agar nilai SAKIP lebih optimal, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan sampai dengan pelaksanaan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan integritas.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM APIP melalui pelatihan, workshop, bimtek, dan PPM.
- c. Membudayakan evaluasi internal kinerja tiap bulan secara berjenjang.
- d. Melakukan inovasi pelayanan pengawasan.

2. Nilai RB

Tidak ada capaian indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2023. Tidak adanya Nilai RB tahun 2023 karena merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Meskipun demikian, Inspektorat Daerah terus melaksanakan perbaikan terkait tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

3. Nilai IPP

Capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2023 sebesar 100,5% dengan realisasi 4,07 (A-) dari target 4,05 (A-). Nilai IPP tahun 2023 mengalami peningkatan dikarenakan Inspektorat Daerah selalu konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya yang telah dilakukan agar nilai IPP lebih optimal, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan sampai dengan pelaksanaan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan integritas.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi secara berkala atas manajemen kualitas jasa pelayanan.

4. Nilai SKM

Capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023 sebesar 105,1% dengan realisasi Sangat Baik (95,01) dari target Sangat Baik (90,00). Hasil SKM melalui media elektronik yang telah ditetapkan dengan Surat Sekretaris Daerah Nomor: 000.8/216/438.1.3.1/2024 tanggal 6 Januari 2024 menunjukkan bahwa nilai SKM Inspektorat Daerah adalah 95,01 dengan capaian 105,10% dari nilai 90,00 yang ditargetkan pada tahun 2023. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 2,26 poin bila dibandingkan dengan Nilai SKM pada tahun 2022. Namun, jumlah responden pada tahun 2023 meningkat signifikan sebesar 112,81% menjadi 864 responden dari 406 responden pada tahun 2022. Capaian Nilai SKM 105,10% menunjukkan bahwa kolaborasi komitmen pimpinan dan



seluruh personil APIP dalam mewujudkan pelayanan pengawasan yang SMART telah terimplikasikan dengan baik.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar nilai SKM lebih optimal, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan sampai dengan pelaksanaan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan integritas.
2. Konsistensi pelayanan pengawasan sesuai dengan SP dan SOP.
3. Meningkatkan kompetensi SDM APIP melalui pelatihan, workshop, bimtek, dan PPM.
4. Memberikan konsultasi secara tatap muka dan daring.

Pada keempat indikator kinerja dalam sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah, tidak tersedia data target nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023.



2. Pencapaian Kinerja Program

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan pelayanankesekretariatan	78%	76,62%	98,23%
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi	87%	92,01%	105,76%
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi	92%	90,17%	98,01%
		Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal A	33%	48,98%	148,42%
		Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%



3. Pencapaian Kinerja Kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran PD	90,50%	93,93%	103,79%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal	70	74	105,71%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90 (Sangat Baik)	95,01 (Sangat Baik)	105,57%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	100%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	80%	95%	118,75%
7.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun tepat waktu	295 Laporan	300 Laporan	101,69%



8.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun tepat waktu	33 Laporan	38 Laporan	115,15%
----	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	---------

4. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Alasan ketidak tercapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.301.233,00	Rp 3.024.000,00	91,60%	Diserap sesuai dengan Kebutuhan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 14.351.676.922,00	Rp 13.891.471.903,00	96,79%	Diserap sesuai dengan Kebutuhan
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 67.500.000,00	Rp 62.400.000,00	92,44%	Diserap sesuai dengan Kebutuhan
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.552.362.959,00	Rp 1.378.220.242,00	88,78%	Diserap sesuai dengan Kebutuhan
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.013.159.632,00	Rp 992.956.713,00	98,01%	Diserap sesuai dengan kebutuhan
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 281.010.262,00	Rp 226.766.936,00	80,70%	Diserap sesuai dengan kebutuhan



7.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 751.879.393,00	Rp 609.832.750,00	81,11%	Diserap sesuai dengan penugasan
8.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp 749.027.500,00	Rp 465.527.500,00	62,15%	Diserap sesuai dengan penugasan



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja tersebut, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, yang meliputi perbandingan hasil capaian kinerja, penjelasan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya-upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

➤ Perkembangan/tren Capaian kinerja:

1. Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Terlaksananya pengawasan yang efektif berbasis risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>	<i>Integrated</i>	100%	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84,50 (A)	86,34 (A)	102,18%	
	Nilai RB	36,13	-	-	*)
	Nilai IPP	4,05 (A-)	4,07 (A-)	100,5%	
	Nilai IKM/SKM	90,00 (Sangat Baik)	95,01 (Sangat Baik)	105,1%	

*) Terjadi perubahan regulasi, merujuk pada Permen PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023.



2. Tabel Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya pengawasan yang efektif berbasis risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Infrastructure</i>	<i>Integrated</i>	Melampaui pencapaian tahun sebelumnya
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84,47 (A)	86,34 (A)	Melampaui pencapaian tahun sebelumnya
	Nilai RB	36,12	-	Terjadi perubahan regulasi, merujuk pada Permen PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023
	Nilai IPP	4,04 (A-)	4,07 (A-)	Melampaui pencapaian tahun sebelumnya
	Nilai IKM/SKM	97,27 (Sangat Baik)	95,01 (Sangat Baik)	Target tercapai



3. Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis / indikator sasaran strategis	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional Tahun 2023	Keterangan
Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>	-	-
Nilai SAKIP	86,34 (A)	-	-
Nilai RB	-	-	-
Nilai IPP	4,07 (A-)	-	-
Nilai IKM/SKM	95,01 (Sangat Baik)	-	-



2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap visi misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian, serta dengan memperhatikan tuntutan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindak lanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Sidoarjo, maka perlu dilakukan pemetaan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis yaitu melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pelayanan PD. Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan terutama pengawasan proyek pekerjaan umum;
2. Masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat pada tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan;
3. Obrik kurang respon atas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menjadi kewajibannya meskipun sudah diberikan peringatan (khususnya temuan/rekomendasi yang lama);
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara optimal pada tingkat Perangkat Daerah;
5. Kapabilitas SDM APIP masih perlu ditingkatkan; serta
6. Keterbatasan fungsional auditor yang kompeten dalam bidang Teknologi Informasi.

Berdasarkan permasalahan yang ada diperoleh asumsi sebagai berikut :

1. Jika kemampuan aparat pengawas ditingkatkan maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan lebih optimal dan profesional;
2. Perlu adanya analisis yang lebih mendalam terhadap obyek pemeriksaan yang berpeluang/beresiko tinggi terjadi penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan;
3. Jika Inspektorat Daerah sebagai Perangkat Daerah pembina SPIP melaksanakan fungsinya secara intensif sebagaimana yang telah ditentukan, maka implementasi SPIP di tingkat Perangkat Daerah akan berjalan optimal.



2.3.1 Kelemahan Dan Kekuatan Internal

Adapun Kelemahan dan Kekuatan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

a. Kelemahan

1. Kemampuan Aparat Pengawasan yang tidak merata;
2. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemeriksaan yang ada saat ini belum memadai.

b. Kekuatan

1. Adanya dukungan pimpinan daerah;
2. Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas;
3. Adanya kewenangan yang jelas;
4. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.3.2 Peluang dan Tantangan External

Adapun Peluang dan Tantangan External Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

a. Peluang

1. Adanya kesempatan meningkatkan kinerja pengawasan sesuai dengan perubahan kelembagaan;
2. Adanya kesempatan meningkatkan SDM aparat pemeriksaan melalui pendidikan fungsional pengawasan.

b. Tantangan

1. Apabila terjadi mutasi pegawai yang telah mendapat sertifikat pengawasan sedang penggantinya belum siap dengan tugas baru;
2. Regulasi berubah-ubah;
3. Adanya isu KKN, selaku APIP yang menjadi obrik adalah kolega sendiri.

Faktor-faktor sebagai penentu keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya manusia (personil) yang profesional;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai;
3. Hasil pemeriksaan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi instansi Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kinerja instansi.
4. Pemantauan/monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan, sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan yang direncanakan terutama pada obyek pemeriksaan yang berisiko tinggi terjadinya penyimpangan.
5. Hasil evaluasi program pengawasan selalu digunakan sebagai bahan perbandingan perencanaan program pengawasan tahun berikutnya



6. Hasil tindak lanjut pengawasan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rancangan awal RKPD dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 terdiri dari 6 (enam) Program dan 22 (duapuluh dua) kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016.
2. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017 terdiri dari 5 (lima) Program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2017.
3. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2018.
4. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019 terdiri dari 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2019.
5. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020 terdiri dari 2 (dua) Program dan 5 (lima) Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2020.
6. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) Program dan 11 Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2021.
7. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) Program dan 11 Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022.
8. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) Program dan 8 Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023.

Terdapat perbedaan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Tahun 2016 ada tambahan 2 (dua) kegiatan yaitu pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertambah 1 kegiatan (Penyediaan jasa surat menyurat), pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur kegiatan berubah menjadi pengadaan pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya



2. Tahun 2017 berkurang 1 (satu) kegiatan yaitu pengadaan pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya;
3. Tahun 2018, berkurang 1 (satu) kegiatan yaitu penyusunan dokumen perencanaan dan laporan keuangan dan capaian kinerja;
4. Tahun 2019 dilakukan perampingan program dan kegiatan menjadi 2 (dua) program dan 6 kegiatan;
5. Tahun 2020 melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 kegiatan; bertambah 1 (satu) program dari tahun 2019 yang nomenklaturnya disesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019;
6. Tahun 2021 tetap melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 kegiatan;
7. Tahun 2022 tetap melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 kegiatan;
8. Tahun 2023 berkurang 1 (satu) program yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang nomenklaturnya disesuaikan dengan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.



Renja Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Inspektorat Sidoarjo s/d Tahun 2024

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	601	INSPEKTORAT DAERAH			K	Rp.														
	60101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	85%	26.000.902.857,55	76	4.325.166.465	78	17.269.011.008	77	16.554.839.794	98,23%	96%	80	16.414.239.603	0	8.727.555.523	0,00%	33,57%
	60101201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	9	30.958.775,17	7	-	9	3.301.233	9	3.024.000	100,00%	92%	9	3.792.025	6	2.840.750	66,67%	9,18%
			Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	laporan	4		1	1.524.000	4	-	4	-	100,00%		4		2		50,00%	
	6010110104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	2.555.235,17	0	-	4	3.301.233	4	3.024.000	100,00%	92%	4	3.792.025	2	2.840.750	50,00%	111,17%
	60101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	&	92	18.841.718.154,91	95,04	13.404.650.752	90,50	14.351.676.922	93,93	13.891.471.903	100,00%	97%	91	13.107.117.144	85,03	7.838.857.138	92,42%	41,60%
	6010110201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	74	18.837.801.687,41	81	13.404.650.752	81	14.351.676.922	81	13.891.471.903	100,00%	97%	81	13.107.117.144	74,00	7.838.857.138	100,00%	41,61%
	60101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	%	90%	277.872.583,75	87,54	58.925.000	84	67.500.000	84	62.400.000	100,00%	92%	86	363.488.140	0,00	73.240.000	0,00%	26,36%
			Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	%	85%		100		79		79		100,00%		81		0,00		0,00%	
	6010120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal	orang			139	58.925.000												
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	50	171.872.583,75	0	-	70	67.500.000	74	62.400.000	100,00%	92%	49	363.488.140	13	73.240.000	26,00%	42,61%
	60101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	nilai	93	2.300.409.096,25	97,28	1.160.668.188	90	1.552.362.959	95,01	1.378.220.242	100,00%	89%	91	1.436.662.001	97,66	414.998.589	105,01%	18,04%
	6010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	paket	1	20.129.097,10	280 buah	15.897.250	1	23.267.167	1	19.072.500	100,00%	82%	1	15.803.027	1	12.779.179	100,00%	63,49%
	6010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	32.264.849,90	2185 buah	28.008.600	1	30.446.507	1	26.281.300	100,00%	86%	1	22.923.499	1	19.766.700	100,00%	61,26%
	6010120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	25.760.896,60	516 buah	15.247.500	1	9.917.073	1	8.541.400	100,00%	86,13%	1	2.790.207	1	2.271.000	100,00%	8,82%
	6010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	paket	1	366.025.000,00	16127 buah	217.749.345	1	250.000.000	1	229.953.725	100,00%	91,98%	1	230.306.105	0	62.573.250	0,00%	17,10%
	6010120605	Penyediaan Barang Catatan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Catatan dan Penggandaan Yang Disediakan	paket	2	37.411.714,37	3123 buah	25.553.250	2	18.253.000	2	12.513.943	100,00%	68,56%	2	13.400.000	0	6.699.090	0,00%	17,91%
	6010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	3	15.563.342,03	1932 buah	14.662.434.275							3	3.720.000	1,5	1.410.000	50,00%	
	6010120608	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	4	403.536.779,31	9108 buah	251.426.742	4	272.047.500	4	251.714.300	100,00%	92,53%	4	212.042.500	2	84.765.500	50,00%	21,01%
	6010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4	1.385.076.416,95	31 kali	588.012.821	4	948.431.712	4	830.143.074	100,00%	87,53%	4	935.676.663	2	224.233.870	50,00%	16,19%



Renja Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.
2	3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	%	100	1.555.616.108,72	100	938.474.140	100	1.013.159.632	100	992.956.713	100,00%	98,01%	100	1.083.596.400	100	315.097.416	100,00%	20,26%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	2.500.000,00	6384 surat	514.100	4	600.000	4	286.000	100,00%	47,67%	4	500.000	2	246.000	50,00%	9,84%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	4	316.245.600,00	12 bulan	142.682.716	4	172.500.000	4	163.257.069	100,00%	94,64%	4	155.500.000	2	67.150.071	50,00%	21,23%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	laporan	4	1.236.870.508,72	12 bulan	795.277.324	4	840.059.632	4	829.413.644	100,00%	98,73%	4	927.596.400	2	247.701.345	50,00%	20,03%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	83	857.028.867,99	39 unit	254.813.953	80	281.010.262	95	226.766.936	100,00%	80,70%	81	419.583.893	95	82.521.630	114,46%	9,63%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	47.265.314,83	30 buah	16.294.815	1	30.776.999	1	12.380.921	100,00%	40,23%	1	29.572.649	1	9.132.157	100,00%	19,32%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	192.073.603,16	56 buah	43.949.098	13	96.733.263	13	83.980.251	100,00%	86,82%	15	68.811.244	10	37.868.026	66,67%	19,72%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	buah	50	202.777.850,00	29 buah	91.246.999	35	98.500.000	36	91.617.314	100,00%	93,01%	40	80.000.000	23	23.029.250	46,00%	11,36%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	411.412.100,00	0	52.264.930	0	55.000.000	2	38.788.450	100,00%	70,52%	1	241.200.000	0	12.312.197	0,00%	2,99%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan	%	100	3.821.332.725,00	0	1.244.348.500	100	1.500.906.893	100	1.075.360.250	100,00%	71,65%	100	1.102.832.504	0,00	309.399.000	0,00%	8,10%
	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal A	%	39		45,83		33		48,98		100,00%		35		0,00		0,00%	
	Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100,00%		100		100,00%		100,00%	
	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi	%	90		92,19		87		92,01		100,00%		88		85,29		94,77%	
	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi	%	95		91,33		92		90,17		98,01%		93		90,10		94,84%	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun tepat waktu	laporan	340	1.641.262.405,39	318	437.549.500	295	751.879.393	300	609.832.750	100,00%	81,11%	330	590.472.504	117	222.311.500	34,41%	13,55%
Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	laporan	298	585.438.300,00	156	-	295	482.240.000	300	454.582.500	100,00%	94,26%	296	491.800.000	84	167.600.000	28,19%	28,63%
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	2	85.017.392,60	2	4.840.250	2	7.419.751	2	6.676.750	100,00%	89,99%	2	7.792.263	0	6.770.000	0,00%	7,96%
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	1	419.342.544,58	1	151.456.250	1	119.761.591	1	12.787.000	100,00%	10,68%	1	14.788.168	1	10.758.000	100,00%	2,57%
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	laporan	57	338.264.181,75	84	115.875.000	57	133.462.500	57	127.700.000	100,00%	95,68%	57	67.000.000	30	31.737.500	52,63%	9,38%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	laporan	4	213.199.986,46	7	5.590.000	4	8.995.551	16	8.086.500	100,00%	89,89%	4	9.092.073	2	5.446.000	50,00%	2,55%
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun tepat waktu	laporan	50	2.180.070.319,61	39	529.037.500	33	749.027.500	38	465.527.500	100,00%	62,15%	45	512.360.000	26	87.087.500	52,00%	3,99%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	laporan	1	499.018.096,16	100%	109.500.000	1	180.750.000	4	100.000.000	100,00%	55,33%	1	277.650.000	0	40.000.000	0,00%	8,02%
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	laporan	38	1.681.052.223,45	29	419.537.500	32	568.277.500	37	365.527.500	100,00%	64,32%	34	234.710.000	26	47.087.500	68,42%	2,80%



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional, antara lain :

1. Penguatan ketahanan ekonomi;
2. Pengembangan wilayah;
3. Peningkatan SDM;
4. Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Penguatan infrastruktur;
6. Pembangunan lingkungan hidup;
7. Penguatan stabilitas politik, budaya, pertahanan, keamanan (polbudhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 yang berisikan 17 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati antara lain :

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru;
2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga;
3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin;
4. 10.000 Beasiswa Kuliah;
5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama;
6. Rp 5 Juta - Rp 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan;
7. Rp 6 Juta Operasional RT Per Tahun;
8. 20.000 UMKM Naik Kelas;
9. Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan;
10. Tingkatkan kesejahteraan tenaga Kesehatan dan kader Posyandu;
11. Tingkatkan kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorar;
12. Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda;
13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi;
14. Tingkatkan ADD untuk Desa Sejahtera;
15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respons Cepat.



16. Reformasi Perizinan untuk Bisnis Kondusif
17. Perluas RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

a. Tujuan Renja Inspektorat

Tujuan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Melalui Pengawasan yang Efektif”

b. Sasaran Renja Inspektorat

Sebagai wujud implementasi atas tujuan Renja di atas, sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko; dan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo ditunjang dengan 2 (dua) program sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Pada program ini terdapat 8 (tujuh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) subkegiatan sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub kegiatan sebagai berikut :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub kegiatan sebagai berikut :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

Sub kegiatan sebagai berikut :

1.3.1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD



- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 1.5.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 1.5.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 1.5.9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.6.2. Pengadaan Mebel;
 - 1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.8.3. Pemeliharaan Mebel;
 - 1.8.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.8.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



2. Program penyelenggaraan pengawasan

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

Sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;

2.1.2. Reviu Laporan Kinerja;

2.1.3. Reviu Laporan Keuangan;

2.1.4. Pengawasan Desa;

2.1.5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Sub kegiatan sebagai berikut :

1.2.1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;

1.2.2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang tertuang pada pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022, pada tahun 2025 akan mengoptimalkan sistem pengawasan internal untuk mendukung terwujudnya 17 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang tertuang pada RPJMD tahun 2021-2026. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, berikut ini adalah rencana kerja dan pendanaan Inspektorat tahun anggaran 2025:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				7 Dokumen	23.098.540,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	16.250.000,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				1 Data	15.000.040,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase realisasi anggaran PD</i>	-			91.50 persen	12.979.796.219,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				78 Orang/bulan	12.974.471.219,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	5.325.000,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase BMD PD yang telah teregistrasi Persentase BMD PD yang telah tersertifikasi</i>	-			100 persen 100 persen	0,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	0,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang disiplin Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat</i>	-			88 persen 83 persen	487.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	0,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				74 Orang	487.000.000,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-			92 nilai	1.643.841.538,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.334.095,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	230.306.105,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	6.460.000,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	3.840.000,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				4 Laporan	222.792.150,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	1.107.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan dengan tepat guna	-			73 buah	278.296.836,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				77 Unit	72.831.485,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				28 Unit	205.465.351,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	181.103.358,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	894.401.400,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</i>	-			82 Persen	486.290.717,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	31.732.378,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				15 Unit	95.658.339,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				30 Unit	3.000.000,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				45 Unit	105.000.000,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	250.900.000,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Sidokumpul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				297 Laporan	83.000.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	OPD dan Desa/Kelurahan Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>				2 Laporan	11.009.400,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	OPD dan Desa/Kelurahan Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>				4 Dokumen	9.576.920,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	OPD dan Desa/Kelurahan Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<i>Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun tepat waktu</i>	-			47 laporan	432.792.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	OPD dan Desa/Kelurahan Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>				1 Laporan	325.976.350,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningka tan tatakelola p emerintah an yang bersih melalui Percepatan transformas i digital dan pelayanan publik berkualitas serta imple mentasi pe mbangunan berkelanjut an	OPD dan Desa/Kelurahan Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>				36 Laporan	106.816.350,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningka tan tatakelola p emerintah an yang bersih melalui Percepatan transformas i digital dan pelayanan publik berkualitas serta imple mentasi pe mbangunan berkelanjut an	OPD dan Desa/Kelurahan Kabupaten Sidoarjo Kab. Sidoarjo		0,00	INSPEKTORAT
J U M L A H								17.632.071.828,00							0,00	



BAB V

PENUTUP

Setiap Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Awal RKPD serta Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Penetapan visi dan misi serta usulan program yang tertuang didalam Renja merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu satu tahun yang akan datang. Penyusunan Renja ini disamping bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, juga sebagai upaya sistematis terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

Sidoarjo, 09 Juli 2024

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP 197009261990031005